



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 141/325 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT
DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Katingan Tengah perlu diangkat dan ditetapkan Sekretaris Damang Kepala Adat di Kecamatan Katingan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. TENONG Tanggal 30 Maret 2023 dan Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor : 022/DAD-Kat/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Rekomendasi Pergantian antar waktu Mantir adat Kecamatan dan Sekretaris Damang Kecamatan Katingan Tengah tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Damang Kepala Adat di Kecamatan Katingan Tengah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

h
h
g

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH.**
- KESATU** : Sekretaris Damang Kepala Adat di Kecamatan Katingan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Sekretaris Damang Kepala Adat di Kecamatan Katingan Tengah yaitu selama 4 (empat) tahun terhitung dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA** : Kepada Sekretaris Damang Kepala Adat di Kecamatan Katingan Tengah diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT** : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/463 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Katingan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juli 2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Tembusan :


1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Handwritten initials and signature

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 141/325 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN
 SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT
 DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	NORHIDAYAT	-	SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT	KATINGAN TENGAH	- Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor : 022/DAD-KAT/V/2023 Hal Rekomendasi Pergantian antar waktu mantir adat Kecamatan dan Sekdam Kecamatan Katingan Tengah tanggal 22 Mei 2023
2.	TENONG	SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT	-	KATINGAN TENGAH	- Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri a.n. TENONG tanggal 30 Maret 2023

BUPATI KATINGAN,


 SAKARIYAS

Handwritten initials and marks in blue ink.